



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARIFAH NURAINI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 629353

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.190.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/144 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/96 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 7.500 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
8. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
9. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
10. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
11. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL



SENDIRI Rp. 60.000.000

12. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL

SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

20.500.000

1. MOTOR, HONDA ACB2J22B02 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI

Rp. 4.500.000

2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

125.100.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

3.350.000

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

1.338.950.000

III. HUTANG

Rp.

147.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.191.450.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.